

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	berbasis hasil laut dan perikanan							
			Meningkatnya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk 8 produk bidang industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	35 produk industri farmasi berbasis hasil laut dan perikanan	-	5 produk	10 produk	20 produk	Kemenperin	Kemenkes, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), BPOM	APBN
3.	Peningkatan Pengelolaan dan Peman-faatan Sum-ber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara Seimbang dan Berke-lanjutan	Pendayagu-naan pesisir	Fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (lokasi)	16 kawasan	4	4	4	4	KKP	Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
C.5 KONSERVASI PERAIRAN											
1.	Peningkatan Pelindungan terhadap Kelestarian Keaneka-ragaman Hayati Laut melalui Konservasi Ekosistem, Jenis, dan Genetik	Pelindungan dan peman-faatan kawa-san konserva-si dan keane-karagaman hayati laut	Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan	35 kawasan (kumulatif)	28	30	33	35	KKP	Kemen-LHK, LIPI, Pemda	APBN, APBD
		Pelindungan dan peman-faatan kawa-san konserva-si dan keane-karagaman hayati laut	Peningkatan populasi dan pelindungan keanekaragam-an hayati laut	20 spesies (kumulatif)	15	19	19	20	KKP	LIPI	APBN
		Pembinaan konservasi ekosistem esensial	Terbentuknya dan berfungsi-nya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah kawasan bakau yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	-	6 kawa-san bakau di 2 eko-region (Suma-tra dan Jawa)	-	-	Kemen-LHK	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Pengelolaan kawasan konservasi	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan konser-vasi (KPHK) nontaman na-	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi la-ut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	-	10 unit	10 unit	10 unit	Kemen-LHK	KKP, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			sional pada kawasan pesi- sir dan laut								
			Peningkatan efektivitas pengelolaan taman nasio- nal dan kawasan konservasi nontaman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keaneka- ragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi di pesisir dan laut yang ditingkatkan efektivitas pengelola- nya hingga memperoleh nilai indeks <i>Management Effectiveness Tracking Tool</i> (METT) minimal 70%	-	17	35	50	Kemen-LHK, KKP	LIPi, Pemda	APBN, APBD
		Konservasi spesies dan genetik	Peningkatan populasi keanekara- gaman hayati di taman nasional dan kawasan konservasi nontaman nasional	Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing, dan keaneka- ragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir	-	2%	2%	2%	Kemen-LHK, KKP	LIPi, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			pesisir dan laut								
		Konservasi sumber daya alam hayati	Terbentuk dan beroperasinya KPHK nontaman nasional di pesisir dan laut	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi la- ut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	-	10	20	30	Kemen-LHK, KKP		APBN
			Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi nontaman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keaneka- ragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (Cagar Alam Laut, Suaka Marga- satwa Laut dan Taman Wisata Alam Laut) yang ditingkatkan efektivitas pengelola- nya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	-	10	20	30	Kemen-LHK, KKP	Pemda	APBN, APBD
			Meningkatnya populasi ke- anekaragaman	Peningkatan populasi pe- nyu dan ke-	-	2%	2%	2%	Kemen-LHK, KKP		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			hayati di ka-wasan konser-vasi nontaman nasional pesir dan laut	anekaragaman jenis ikan di kawasan konser-vasi non-taman nasio-nal pesisir dan laut							
		Pengelolaan taman nasional	Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasio-nal di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keaneka-ragaman hayati	Jumlah taman nasional laut dan pesisir yang memper-oleh nilai indeks METT minimal 70%	-	20 taman nasional	-	-	Kemen-LHK, KKP		APBN
			Meningkatnya populasi ke-anekaragaman hayati di ta-man nasional pesisir dan laut	Peningkatan populasi penyusisik, penyubelimbing, dan keanekaragam-an jenis ikan di wilayah laut dan pesisir	-	2%	-	-	Kemen-LHK, KKP		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
2.	Penguatan Konservasi Ekosistem, Jenis, dan Genetik	Pelindungan dan peman-faatan kawa-san konser-vasi dan keane-karagaman hayati laut	Fasilitasi penambahan luas kawasan konservasi	Penambahan luas kawasan konservasi sebesar 3,5 juta ha	0,6 juta ha	0,8 juta ha	0,9 juta ha	1,2 juta ha	KKP	Kemenko Maritim, Kemen-LHK, Pemda	APBN, APBD
		Penyeleng-garaan pela-tihan masya-rakat dan pengembang-an generasi lingkungan hidup	Meningkatnya kapasitas kader ling-kungan hidup	Jumlah kader lingkungan hidup yang dilatih me-ningkat kapa-sitasnya	-	600 orang	1800 orang	3000 orang	Kemen-LHK		APBN
		Konservasi sumber daya alam hayati	Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi nontaman nasional	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi nontaman nasional yang memiliki usaha ekonomi produktif	-	27 desa	27 desa	27 desa	Kemen-LHK	KKP, Pemda	APBN, APBD
3.	Pengembang-an Kerja Sama Bilateral, Regional, dan	Pelindungan dan peman-faatan kawa-san konser-vasi	Pembinaan kemitraan kawasan konser-vasi yang	Terciptanya jejaring pengelolaan kawasan	3	3	5	5	KKP	Kemenko Maritim, Kemen-LHK,	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Global di Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut	si dan keane-karagaman hayati laut	mendukung pengelolaan efektif (lokal, regional, dan global)	konservasi						Pemda	
C.6 REHABILITASI, PENCEMARAN LAUT, DAN PESISIR											
1.	Pencegahan, Penang-gulangan, dan Pemulh-an Dampak Pencemaran dan Kerusak-an Lingkung-an Laut	Pendayagu-naan pulau-pulau kecil	Pulau-pulau kecil dan terluar yang tertata ling-kungannya dan tahan terhadap bencana dan perubahan iklim (pulau)	61 pulau	20	15	20	6	KKP	Kemenko Maritim, Kemen-ESDM, Kemen-PUPR, Kemen-kominfo, Kemen-dikbud, Kemenkes, Kemenhan, Kemenhub, Kemenlu, Kemendes-PDRT, Kemen-LHK, BNPP	APBN
		Pengendalian pencemaran dan kerusak-an pesisir dan laut	Meningkatnya kualitas eko-sistem pantai lamun, terum-bu karang, dan vegetasi	Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistemnya (pantai lamun, terumbu ka-	-	2 kawasan prioritas	-	-	Kemen-LHK	KKP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			pantai pada kawasan pesisir dan laut	rang, dan ve-getasi pantai)							
			Meningkatnya sarana instalasi peng-olahan air lim-bah di per-kampungan nelayan wi-layah pesisir	Jumlah <i>pilot project</i> Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di perkampung-an nelayan yang terben-tuk	-	2 unit			Kemen-LHK	KKP	APBN
			<i>Clean up</i> di lokasi pesisir dan laut yang tercemar tumpahan minyak	Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dila-kukan <i>clean up</i> akibat tumpahan minyak	-	2 lokasi	-	-	Kemen-LHK	KKP, Bakamla, Kemenhub	APBN
			Tersedianya peta, data pen-cemaran, dan sumber pen-cemaran pada kawasan pesisir	Jumlah kawasan pesisir yang dilaku-kan penentu-an <i>baseline</i> pencemar, pemantauan berkala, dan pemetaan sumber pencemar	-	3 kawasan pesisir (prioritas <i>National Capital Integrated Coastal Development</i> –	-	-	Kemen-LHK		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
						NCICD: Jakarta dan Semarang					
2.	Penang-gulangan Bencana Kelautan	Penyeleng-garaan reha-bilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan daerah aliran sungai, serta pengendalian kerusakan perairan darat	Rehabilitasi kawasan hutan bakau	Luas areal rehabilitasi hutan bakau pada kawasan hutan	-	500 ha	-	-	Kemen-LHK	KKP	APBN
		Pendayagu-naan pesisir	Rehabilitasi dan pelindung-an kawasan pesisir di Pan-tura Jawa (bakau)	3,3 juta batang bakau (kumulatif)	400 ribu batang	900 ribu batang	2 juta batang	-	KKP	Pemda	APBN, APBD
		Penyiapan peralatan di kawasan ra-wan bencana	Pengadaan speedboat Manta dan speedboat Polyethylene	34 speedboat Manta dan 34 speedboat Polyethylene	-	34 speed-boat Manta dan 34	-	-	BNPB		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
						speed-boat Poly-ethylene					
		Pengembang-an aplikasi teknologi in-formasi, ko-munikasi, dan kehumasan	Tersedianya data dan infor-masi kebenc-naan diguna-kan untuk kesiapsiagaan dan penang-gulangan bencana (ter-susunnya data dan informasi kebencanaan untuk pengelo-laan pulau-pulau kecil terluar)	4 wilayah	-	4 wilayah	-	-	BNPB	BMKG	APBN
3.	Pengembang-an Tata Guna dan Infrastruktur Pesisir dan Laut yang Berkelanjut-an	Pengembang-an sentra ke-lautan dan perikanan terpadu	Jumlah kawa-san yang di-kembangkan sebagai sentra kelautan dan perikanan terpadu	31 kawasan (kumulatif)	15	20	25	31	KKP	Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomi-an, Kemenkeu, Kemenpar, Kemen-ATR, BKPM,	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										Pemda	
C.7 PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL											
1.	Peningkatan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	Pembangunan/pengembangan fasilitas kepulauan pada wilayah perbatasan	Meningkatnya fasilitas ke-pelabuhanan pada wilayah perbatasan	7 lokasi	7 lokasi	5 lokasi lanjutan	2 lokasi lanjutan	-	Kemenhub, BNPP	KKP, Kemendes-PD TT, BPPT, BUMN	APBN, BUMN
		Peningkatan jaringan trayek angkutan perintis pada wilayah perbatasan, terluar, dan tertinggal	Meningkatnya jaringan trayek angkutan pada wilayah perbatasan	7 trayek	v	v	v	v	Kemenhub, BNPP	KKP, Kemendes-PD TT, Kemendag	APBN
		Pengembangan daerah pulau kecil dan terluar	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau kecil terluar di daerah tertinggal	Jumlah sarana air bersih yang dibangun di pulau kecil terluar di daerah tertinggal	-	3 unit	3 unit	3 unit	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-PUPR	APBN
			Meningkatnya aksesibilitas di pulau kecil	Jumlah pelabuhan rakyat yang dibangun	-	2 unit	2 unit	2 unit	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-PUPR,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			dan terluar	di pulau kecil dan terluar						Kemenhub	
				Jumlah tambahan perahu yang dibangun	-	2 unit	2 unit	2 unit	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-PUPR	APBN
				Pembangunan kapal barang 30 GT	-	4 unit	4 unit	4 unit	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, BUMN	APBN, BUMN
				Pembangunan kapal penumpang kapasitas 50 orang	7 unit	3 unit	3 unit	3 unit	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, BUMN	APBN, BUMN
			Terbangunnya PLTS di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal	Jumlah pembangunan PLTS komunal di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal	-	4 PLTS terpusat	4 PLTS terpusat	4 PLTS terpusat	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-ESDM, Kemen-PUPR	APBN
		Pendayagunaan pulau-pulau kecil	Pembangunan sarana prasarana (sarpras) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	31 PPKT	25	31	31	31	KKP	Kemenhan, Kemen-PUPR	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun di pulau terluar/perbatasan	5.532 km	8.625 km	-	-	Kemen-PUPR	Pemda	APBN, APBD
			Pembangunan jembatan	Panjang jembatan yang terbangun (Jembatan Holtekamp)	100 m	100 m	100 m	100 m	Kemen-PUPR	Pemda	APBN, APBD
		Penyediaan rumah khusus dan pembangunan rumah negara	Pembangunan rumah khusus	100 unit rumah khusus yang terbangun di pulau terluar/perbatasan laut	50 unit	50 unit	-	-	Kemen-PUPR	Pemda	APBN, APBD
		Pembinaan dan pengembangan air minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan khusus	8 SPAM yang terbangun di pulau terluar	1 pulau terluar	1 pulau terluar	3 pulau terluar	3 pulau terluar	Kemen-PUPR	Pemda	APBN, APBD
		Peningkatan/ pengadaan fasilitas dan sarpras matra laut	Peningkatan kesiapan dan penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana (sarpras)	Jumlah pos pulau terluar dan wilayah perbatasan yang diperbaiki	15 pos	14 pos	14 pos	14 pos	TNI	BNPP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Pangkalan TNI								
		Operasi Surya Bhaskara Jaya	Terlaksananya bakti sosial di pulau-pulau kecil yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan peran Kapal Republik Indonesia (KRI) sebagai pasar apung, peng-angkut logis-tik, dan manu-sia	Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat	-	2 kali	2 kali	2 kali	TNI	Kemenko Maritim, Kemenko PMK, Kemenkes, KKP, Kemen-dagri	APBN
C.8 INSENTIF USAHA DAN IKLIM USAHA											
1.	Penciptaan Iklim Investasi Usaha di Bidang Kelautan yang Kondusif dan Efisien	Peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal	Rekomendasi simplifikasi peraturan perizinan dan pelaporan di sektor kelaut-an (berorientasi ekspor dan padat karya)	Rumusan kebijakan penyederhana-an peraturan dan bisnis proses perizin-an di pusat	-	1 paket rumusan reko-mendasi	-	-	BKPM	Kemenkeu	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
2.	Pengembang-an Dunia Usaha di Bidang Kelautan yang Berda-ya Saing Internasional	Pengendalian penangkapan ikan	Waktu pelayan-an izin usaha penangkapan ikan (SIUP)	Lama penyele-saian izin (hari)	9	9	9	9	KKP	Kemenhub	APBN
			Waktu pelayan-an izin kapal penangk-pengangkut ikan (SIPI, SIKPI)	Lama penyele-saian izin (hari)	6	6	6	6	KKP	Kemenhub	APBN
		Akses pasar promosi hasil kelautan dan perikanan	Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan	Peningkatan <i>market share</i> produk kela-utan dan per-ikanan utama di pasar tuju-an ekspor (%)	15	17,5	20	25	KKP	Kemendag	APBN
3.	Penataan Sistem Hukum Nasional di Bidang Kelautan	Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan usaha di bidang perikanan tangkap	Tersusunnya peraturan bi-dang usaha perikanan yang mendukung pengembangan usaha di bi-dang perikan-an tangkap	3 peraturan setingkat menteri	1	1	1	-	KKP	Kemenhub, Kemenperin, Kemnaker	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pengelolaan sumber daya ikan	Tersusunnya dokumen Rancangan Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)	11 dokumen RPP WPP-NRI	5	2	2	2	KKP	Pemda	APBN, APBD
		Penyusunan produk hu-kum (peratur-an bersama k/l) turunan Perpres Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>	Tersusunnya prosedur operasi standar dan petunjuk pelaksanaan	2 produk hukum	1	1	-	-	KKP	Kemenhub, Kemen-kumham, Kemenkeu, Polri, TNI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		(Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur)									
		Percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pen-jagaan laut dan pantai	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran	1 Peraturan Pemerintah (PP)	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, KKP, Kemenkeu, Kemenpan-RB, Kemen-kum-HAM, Kemnaker, Kemen-setneg, Setkab, TNI, Polri	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
4.	Implementa-si Hukum Inter-nasional di Bidang Kelautan sesuai dengan Kepentingan Nasional	Ratifikasi konvensi internasional yang terkait dengan ke-selamatan dan keamanan pelayaran serta pelin-dungan ling-kungan mari-tim yang di-kehuarkan oleh Organi-sasi Inter-Nasional (IMO)	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta berdaya saing inter-nasional	Perpres	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenlu, Kemenkum-HAM, Kemnaker, Kemen-setneg, Setkab	APBN
		Penyusunan regulasi ten-tang petunjuk pelaksanaan dari konvensi internasional di bidang pe-layaran yang telah dirati-fikasi	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta berdaya saing internasio-nal	Peraturan Menteri	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenlu, Kemenkum-HAM, Kemnaker, Kemen-setneg, Setkab	APBN
5.	Pembangunan Sistem Tata Kelola Kelautan Nasional yang	Pengelolaan sumber daya ikan	Inisiasi pem-bentukan ke-lembagaan WPP-NRI	4 kelembaga-an (kumulatif)	1	2	3	4	KKP	Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Baik, Transparan, dan Bertang-gung Jawab										
6.	Penyusunan dan Pengem-bangan Basis Data dan Infor-masi Ekonomi Kelautan	Penyusunan data/informa-si ekonomi maritim	Tersusunnya data/informasi ekonomi mari-tim	1	1	1	1	1	Kemenko Maritim	BPS, KKP	APBN
7.	Pengembang-an Kemitra-an Usaha di Bidang Kelautan yang Saling Menguntung-kan	Pengelolaan kenelayanan	Tersedianya akses penda-naan usaha bagi nelayan	34 provinsi	34	34	34	34	KKP	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BUMN	APBN, BUMN
			Meningkatnya kelembagaan usaha nelayan	2.200 kelompok	2.050	2.100	2.150	2.200	KKP	Pemda	APBN, APBD
		Penyuluhan dan Pendam-pingan Perko-perasian	Kebertanjutan usaha mikro melalui Kope-rasi untuk mendukung kemaritiman	Kelompok usaha bersa-ma pra kope-rasi yang di-dampingi un-tuk memben-tuk koperasi	-	100 kelompok pra koperasi	225 kelompok pra koperasi	225 kelompok pra koperasi	Kemenkop-UKM	KKP	APBN
		Percepatan perjanjian konsesi terhadap termi-	Mendorong pembangunan infrastruktur dan pening-	Perjanjian (konsesi)	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenkeu, Swasta	APBN, Swasta, Joint Venture

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		nal eksisting (yang telah dibangun) dalam rangka penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepela-buahan oleh Badan Usaha Pelabuhan	katan investasi melalui pembiayaan badan usaha								
C.9 PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KELAUTAN											
1.	Pembangun-an Kawasan Ekonomi Kelautan Secara Terpadu dengan Menggunakan Prinsip Ekonomi Biru (Blue Economy) di Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Pulau-pulau Terluar, dan Perairan Laut Indonesia secara	Pengelolaan kenelayanan	Tersedianya kawasan sentra/kam-pung nelayan yang tertata dan terinte-grasi	200 kawasan sentra nelayan (kumulatif)	100	110	200	200	KKP	Kemen-PUPR, Pemda	APBN, APBD
		Pembinaan dan pengem-bangan ka-wasan per-mukiman	Pembangunan dan pengem-bangan kawasan permukiman perkotaan	Penataan kampung nelayan di 11 kawasan	-	6 kawasan	5 kawasan	-	Kemen-PUPR	KKP	APBN
		Pengelolaan pelabuhan perikanan	Tersedianya pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan/	4 pelabuhan ramah ling-kungan	-	-	4	4	KKP	Kemen-LHK	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Realistis		ecoport								
		Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur	Berkembangnya sentra industri kecil menengah berbasis pengolahan hasil laut dan perikanan yang direvitalisasi	17 sentra	4	4	4	5	Kemenperin	KKP	APBN
		Pengembangan wilayah industri I dan II	Tersedianya sarana dan prasarana di dalam Kawasan Industri Bitung-Sulawesi Utara dengan produk unggulan pengolahan hasil laut dan perikanan	4 paket sarana dan prasarana	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kemenperin	KKP	APBN
			Terbangunnya sentra industri kecil dan menengah berbasis pengolahan hasil	11 dokumen feasibility study	7	3	1	-	Kemenperin	KKP	APBN
				8 dokumen detailed engineering	2	5	1	-	Kemenperin	KKP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			laut dan perikanan	design							
				4 sentra industri kecil dan menengah	1	1	1	1	Kemenperin	KKP	APBN
		Pembangunan kawasan industri berbasis hasil laut dan perikanan		Pembangunan sarana dan prasarana dalam kawasan industri Bitung	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kemenperin	KKP, Kemen-PUPR	APBN
		Pengembangan pelabuhan perikanan	Tersedianya pelabuhan perikanan yang mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan nasional	816 pelabuhan perikanan (KEPMENKP No.45 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional)	200	200	200	216	KKP	Kemenhub, Kemen-PUPR, BPPT	APBN
2.	Optimalisasi Penyediaan Fasilitas Infrastruktur yang Dibutuhkan Dunia Usaha dan Pelaku Usaha	Pembangunan/lanjutan/ penyelesaian armada kapal negara angkutan laut perintis	Meningkatnya kapasitas sarana prasarana (sarpras) transportasi laut untuk mengurangi	100 unit	30	70	-	-	Kemenhub	Kemen-PUPR	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Kela-utan Teruta-ma Nelayan		backlog dan bottleneck								
3.	Pengembang-an Kerja Sama Ekonomi Berkelanjut-an dengan Negara Maritim Strategis Bidang Kelautan	Pengelolaan kerja sama kelautan dan perikanan dan hubungan masyarakat	Terwujudnya kerja sama internasional dan antar-lembaga yang implementatif	Jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian bidang kelaut-an dan per-ikanan yang telah disepa-kati dan diim-plementasikan	30 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	KKP	Kemenlu	APBN
4.	Sinergi Kepentingan Nasional Strategis dalam Me-nentukan Kawasan Pengembang-an Infra-struktur Kelautan	Pembangun-an pusat per-tumbuhan in-dustri dan maritim	Terbangunnya kawasan in-dustri Kawa-san Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan/ sentra industri		-	v	v	v	Kemenko Perekonomi-an	Kemenperin, Kemen-PUPR, Kemenhub, KKP, Penda	APBN, APBD